

SOSIALISASI DAMPAK NEGATIF *BLACK CAMPAIGN* TERHADAP KEAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2018 DI PROVINSI JAWA BARAT

Yusa Djuyandi,¹ Ari Ganjar Herdiansah,² Jafar Fikri Alkadrie³

^{1,2}Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

³Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia.

Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

ABSTRAK,

Pelaksanaan kontestasi demokrasi menimbulkan berbagai kampanye politik yang diartikan secara tidak sehat seperti *black campaign*. Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi *black campaign* dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 serta menganalisis dampak *black campaign* terhadap kondisi keamanan dan upaya penanganannya melalui sosialisasi bahaya *black campaign* bagi keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data primer penelitian ini diperoleh dari hasil observasi atas penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat tahun 2018 dan pelaksanaan sosialisasi dampak negatif dari *black campaign*, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai media yang memberitakan adanya *black campaign* pada Pilkada Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aktivitas *black campaign* yang muncul dalam Pilkada Gubernur Jawa Barat tahun 2018 menyerang seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, beberapa pelaku pembuat dan penyebar *black campaign* kemudian ada yang berhasil ditemukan. Upaya untuk mencegah dampak negatif *black campaign* bagi keamanan Pilkada dilakukan melalui aktivitas sosialisasi, hasilnya para peserta yang merupakan para siswa dapat memahami bahaya *black campaign* dan menilai pentingnya mencegah penyebaran *black campaign*.

Kata kunci: black campaign, Pilkada, Jawa Barat, Keamanan, sosialisasi.

SOCIALIZATION OF BLACK CAMPAIGN NEGATIVE IMPACTS ON THE SECURITY IN 2018 REGIONAL HEAD ELECTIONS IN WEST JAVA

ABSTRACT,

Implementation of democratic contestation rise to various political campaigns unfairly interpreted as *black campaign*. This study focuses on identifying *black campaigns* in the West Java Governor Election in 2018 and analyzing the impact of *black campaign* on security conditions and its handling efforts through the dissemination of *black campaign* hazards for security. This study uses qualitative methods, the primary data of this study were obtained from observations on the implementation of the 2018 West Java Regional Election and the implementation of the negative impacts of the *black campaign*, while the secondary data was obtained from various media that reported the existence of *black campaigns* in the West Java Governor Election in 2018. This research was founded that the *black campaign* activities which appeared in the West Java Governor Election in 2018 attacked all governor and vice governor candidates, some of the *black campaign* makers and disseminators were found. Efforts to prevent the negative impact of *black campaigns* for the security of elections are carried out through socialization activities, while the results are socialization participants, who are high school students, can understand the negative impacts of *black campaigns* and assess the importance of preventing the spread of *black campaigns*.

Key words: *black campaign, West Java, regional election, security, socialization*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu perwujudan dari implementasi sistem politik demokrasi di Indonesia. Pilkada serentak tahun 2018 yang salah satunya diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu gelaran pesta demokrasi yang dinanti-nanti oleh masyarakat Jawa Barat, sebab dengannya masyarakat akan memilih pasangan calon kepala daerah yang mampu melanjutkan dan terus mendorong program-program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Bagi pasangan calon kepala daerah yang bersaing dalam Pilkada, mereka akan bekerja keras untuk memperoleh kemenangan dengan meyakinkan masyarakat untuk memilih dirinya dengan menawarkan visi dan misi serta rencana program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya mempengaruhi pilihan masyarakat di dalam kontestasi politik lokal yang dilakukan melalui

pertarungan visi dan misi, gagasan serta program kerja merupakan bentuk dari kampanye positif, selain itu bentuk kampanye positif lain yang umumnya dilakukan oleh para calon kepala daerah adalah dengan turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi warga. Membangun sistem politik demokrasi yang aman membutuhkan adanya peran serta dari semua pihak, termasuk para kandidat dan tim sukses yang perlu menumbuhkan kampanye politik yang positif dan meniadakan kampanye hitam (*black campaign*) dalam memenangkan persaingan. Masa kampanye yang diselenggarakan sebelum masa pemilihan idealnya menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendengar, melihat dan menelaah program kerja dari seluruh pasangan calon, selepas dari masa kampanye maka masyarakat telah memiliki penilaian untuk menentukan siapa orang yang mereka anggap layak untuk dipilih.

Meskipun upaya untuk mendorong kampanye positif selalu diserukan oleh pemerintah maupun penyelenggara pemilu, termasuk dengan turut serta melibatkan para

pasangan calon kepala daerah maupun tim suksesnya, namun pada kenyataannya kampanye hitam seringkali muncul dalam beberapa perhelatan Pilkada. Di dalam proses Pilkada Jawa Barat tahun 2018, kekhawatiran akan munculnya *black campaign* juga menjadi hal yang diantisipasi oleh KPU Provinsi Jawa Barat.¹ Kampanye hitam dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik, jenis kampanye ini mengungkapkan sebuah informasi tentang seseorang yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya (*hoax*) dan dilakukan oleh pihak yang tidak dikenal. Menurut Cangara (2009) *black campaign* (Kampanye hitam) dimaknai sebagai usaha untuk mengisi jabatan tertentu, terutama untuk jabatan publik dengan cara-cara yang tidak sehat.

Munculnya *black campaign* dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan penyelenggaraan Pilkada,² sebab dapat menimbulkan reaksi yang tidak tepat dan berlebihan dari tim pasangan calon yang diserang sehingga berujung pada munculnya potensi gesekan antar masa pendukung pasangan calon. Keamanan dalam proses Pilkada adalah hal yang penting, keamanan menurut Born, et.al. (2003: 16) adalah upaya untuk menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif dan terhindar dari adanya ancaman atau gangguan perusuh yang berasal dari dalam masyarakat. Dengan kata lain jika dalam sebuah proses Pilkada kemudian muncul gesekan antara dua atau lebih kelompok yang menimbulkan kerusuhan maka keamanan menjadi terganggu.

Dampak dari *black campaign* yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas politik dapat dipersepsikan sebagai adanya ancaman keamanan dari sektor politik, setidaknya menurut Buzan (dalam Prihatono, dkk., 2007: 3) maupun menurut Born et.al. (2003: 16) bahwa sektor politik juga memberikan kontribusi bagi munculnya gangguan keamanan. Meski gangguan keamanan dari sektor politik bukan merupakan ancaman keamanan yang bersifat militer, namun upaya pencegahannya dianggap penting sebab mampu menimbulkan adanya konflik yang meluas.

Kampanye hitam (*black campaign*) ditinjau dari perspektif keamanan dapat mengganggu kondusivitas pelaksanaan Pilkada, oleh karena itu segala penyebaran kampanye hitam melalui berbagai media telah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan aparat keamanan. Salah satu media yang saat ini seringkali digunakan untuk penyebaran *black campaign* adalah media sosial, dan untuk mengantisipasi penyebaran *black campaign* melalui media sosial kemudian Polda Jabar

telah membidik puluhan akun sosial media.³ Adapun kelompok masyarakat yang seringkali berinteraksi dengan media sosial adalah kelompok pemuda, dan karenanya kelompok usia ini rentan menyebarkan informasi yang tidak benar (*hoax*) atau *black campaign* kepada pihak lain.

Praktik-praktik *black campaign* secara keseluruhan tentu merugikan siapa pun yang terkena serangan *black campaign*. Bagi masyarakat yang awam, khususnya golongan yang menelan mentah-mentah informasi yang berkembang di masyarakat akan mudah tergiring opininya dan mempengaruhi pilihannya dalam menggunakan hak suara ketika Pilkada. Undang-Undang Pemilu pun sebenarnya sudah mengatur ketentuan terkait praktik-praktik kecurangan yang tidak diperkenankan dalam proses kampanye, termasuk dalam bentuk *black campaign*, akan tetapi praktik-praktik tersebut faktanya tetap berjalan secara intens.

Dengan didasarkan pada fenomena tersebut, sosialisasi akan bahaya *black campaign* terhadap keamanan pada Pilkada di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dianggap perlu dilakukan. Proses sosialisasi ini menguraikan seperti apa *black campaign* dan apa dampaknya terhadap keamanan.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis ini digunakan agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis tentang objek penelitian. Gambaran deskriptif ini diharapkan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini yaitu melihat sosialisasi akan bahaya *black campaign* terhadap keamanan pada Pilkada di Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer, yang merupakan hasil dari observasi dan wawancara, serta data sekunder yang didapatkan dari media massa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dilakukan validasi dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, untuk kemudian setelahnya dilakukan analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Black campaign Jelang Pilkada Jawa Barat

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah sebuah proses demokratis dimana masyarakat turut serta memilih seseorang untuk menduduki jabatan politik dalam lembaga pemerintahan daerah. Pilkada diadakan dengan cara yang kurang lebih terlihat serupa dengan daerah lainnya, namun di dalamnya ada berbagai macam praktik atau fenomena dimana secara sadar ataupun tidak sadar terdapat strategi

¹"KPU Jabar Segera Bentuk Tim Khusus, Antisipasi Kampanye Hitam." Sumber: <http://jabar.tribunnews.com/2017/09/23/kpu-jabar-segera-bentuk-tim-khusus-antisipasi-kampanye-hitam>. [Diakses 28 Oktober 2018].

²Kapolri mengatakan bahwa salah satu ancaman pada Pilkada adalah *black campaign*, alasannya dapat menimbulkan gesekan antar pendukung. Sumber: <http://news.metrotvnews.com/read/2017/12/30/809077/kapolri-sebut-ada-8-ancaman-keamanan-pilkada-serentak>. [Diakses 28 Oktober 2018].

³"Polda Bidik Puluhan Akun Sosmed Black Campaign Pilkada Bekasi dan Jabar." Sumber: <https://metro.sindonews.com/read/1285639/170/polda-bidik-puluhan-akun-sosmed-black-campaign-pilkada-bekasi-dan-jabar-1519742060>. [Diakses 28 Oktober 2018].

black campaign. Penyebaran *black campaign* memiliki dampak negatif yang efeknya cukup membahayakan, diantara efek penyebaran berita palsu adalah konflik horizontal antara pihak yang berkontestasi dalam pilkada (calon, pendukung/relawan, tim sukses calon, serta masyarakat itu sendiri) dan polarisasi (keterbelahan) masyarakat pendukung calon tertentu pasca pelaksanaan pemilihan.

Kampanye hitam dapat terjadi tatkala ada kandidat yang tidak mampu memperluas keterampilannya dalam berkampanye, atau tidak mempunyai visi dan misi maupun program kerja yang siap diadu dengan kompetitor. Munculnya kampanye hitam disisi lain juga menjadi persoalan dalam sistem politik demokrasi, sebab para pemilih berpotensi terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh sebab mereka adanya informasi yang menyudutkan pasangan calon kepala daerah tertentu.

Penyebaran *black campaign* ini dilakukan melalui berbagai media bagi digital ataupun cetak. Maraknya penyebaran tersebut melalui jejaring media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Whatsapp. Melalui media sosial ini biasanya pesan-pesan berantai berisikan *black campaign* disebarluaskan secara massif. Selain media sosial, juga digunakan website berita online tidak resmi yang turut memproduksi isu-isu *black campaign*. Selain itu, seringkali isu-isu *black campaign* dibagikan melalui sebaran-sebaran yang dicetak dan disebarluaskan di berbagai daerah secara massif.

Hal lain terkait *black campaign* dalam pelaksanaan pemilu adalah munculnya kelompok-kelompok profesional yang secara khusus menggunakan kelompoknya untuk melakukan ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah yang menamakan dirinya Saracen. Saracen sendiri merupakan kelompok yang terkoordinir secara digital untuk menyebarkan ujaran-ujaran kebencian di media sosial.⁴ Setelah kegiatannya terbongkar oleh aparat dan diproses secara hukum, terbukti bahwa Saracen dalam melakukan aktivitasnya juga menerima pesanan *black campaign* dengan tarif puluhan juta.⁵ Hal ini menunjukkan telah adanya kapitalisasi terhadap penggunaan *black campaign* dalam pelaksanaan pemilu ini.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Jawa Barat tahun 2018 beberapa calon kepala daerah mendapatkan serangan dalam bentuk kampanye hitam yang tersebar melalui media cetak maupun digital. Munculnya kampanye hitam (*black campaign*) dimaksudkan untuk menjatuhkan reputasi seseorang sehingga kehilangan kepercayaan masyarakat. Beberapa calon kepala daerah yang mendapat serangan melalui kampanye hitam adalah:

⁴“Saracen Terinspirasi Jasmev” <https://x.detik.com/detail/investigasi/20170828/Saracen-Terinspirasi-Jasmev/index.php> [Diakses 1 November 2018]

⁵“Saracen Terima Order Sebar SARA dengan Tarif Puluhan Juta” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170823180943-12-236779/saracen-terima-order-sebar-sara-dengan-tarif-puluhan-juta> [Diakses 1 November 2018]

1. Pasangan nomor urut 1 (Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (RINDU))

Kampanye hitam yang menimpa pasangan nomor urut 1 ini adalah soal dukungan Ridwan Kamil terhadap LGBT dan kelompok Syiah, adapun pasangannya yaitu Uu Ruzhanul Ulum diisukan berpoligami.⁶ Isu terkait dukungan terhadap kelompok LGBT dan isu poligami menjadi berita yang tidak baik bagi pasangan nomor urut 1, dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat yang pada umumnya masih religius eksistensial, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) banyak ditentang karena dianggap tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya.⁷ Sama halnya dengan kelompok Syiah yang masih banyak dipandang sebagai kelompok yang berbeda dengan masyarakat di Jawa Barat.⁸ Demikian pula halnya dengan isu poligami yang dianggap cenderung merugikan kaum perempuan sehingga bagi mereka yang berpoligami kurang begitu mendapat respon positif.

Munculnya kampanye hitam atas pasangan nomor urut 1 dianggap berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Barat terhadap pasangan calon Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, sehingga perolehan suara yang akan didapatkan oleh pasangan ini dalam proses pemilihan bisa turun.

2. Pasangan Urut 2 (Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah))
3. Dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Provinsi Jawa Barat, pasangan Tubagus Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) juga menjadi salah satu target adanya *black campaign*. Meski isu yang kemudian disebarluaskan tidak bersifat personal namun sebaran ini juga dianggap menyudutkan dan bertentangan dengan etika, yaitu dimana singkatan dari pasangan ini diplesetkan dari Hasanah (Hasanudin-Anton Amanah) menjadi Hasetan (Hasanudin-Anton Setan). Atas munculnya kampanye hitam itu kemudian Tim Advokasi dan Hukum Hasanah melaporkan sebuah akun media sosial bernama perisai.rakyat21 yang diduga telah melakukan kampanye hitam dan fitnah terhadap pasangan Hasanah.⁹
3. Pasangan Urut 3 (Sudrajat-Syaikhu (Asyik))
Bagi pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) yang diusung oleh Gerindra, PKS dan PAN serangan berupa kampanye hitam sudah mereka rasakan di awal masa kampanye, yaitu dimana dimunculkan isu bahwa

⁶<https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/26/06/2018/jelang-pilkada-rindu-laporkan-kampanye-hitam-ke-bawaslu-jabar>. [Diakses 31 Oktober 2018].

⁷“Warga Jawa Barat Demo Tolak LGBT.” Sumber: <http://www.tribunnews.com/regional/2016/02/11/warga-jawa-barat-demo-tolak-lgbt> [Diakses 31 Oktober 2018].

⁸“Waspada Syiah PAS Jabar: Umat Islam Wajib Tolak Perayaan Hari Asyura” <https://jurnalislam.com/waspada-syiah-pas-jabar-umat-islam-wajib-tolak-perayaan-hari-asyura/> [Diakses 31 Oktober 2018]

⁹“Pilgub Jabar, Hasanah Diserang Kampanye Hitam.” Sumber: <https://daerah.sindonews.com/read/1289661/21/pilgub-jabar-hasanah-diserang-kampanye-hitam-1521027213> [Diakses 31 Oktober 2018].



Gambar 1. Selebaran Black campaign yang Menimpa Ridwan Kamil



Gambar 2. Selebaran Black campaign yang Menimpa Pasangan Hasanah



Gambar 3. Masyarakat Demonstrasi di Depan DPW PKS Jawa Barat Pada Masa Kampanye Pilgub Jawa Barat Pasca Munculnya Isu Anti NKRI

pasangan Asyik yang di dukung oleh PKS disebutkan anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak toleran.¹⁰ Tentunya permainan isu ini juga dianggap merugikan bagi pasangan Asyik karena berpotensi menggerus perolehan suara kedua pasangan ini, disisi lain munculnya isu ini juga pada akhirnya memunculkan demonstrasi dari kelompok masyarakat yang mempersoalkan tentang anti NKRI, hal yang kemudian disangkal oleh tim Asyik dari PKS bahwa komitmen untuk menjaga NKRI dan toleransi akan terus diutamakan termasuk jika kemudian pasangan Asyik terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023.

¹⁰“Merasa diserang kampanye hitam, pasangan Asyik yakin didukung kekuatan rakyat.” Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/merasa-diserang-kampanye-hitam-pasangan-asyik-yakin-didukung-kekuatan-rakyat.html>[Diakses 31 Oktober 2018].



Gambar 4. Serangan Black Capaign dalam Portal politik panas.com terhadap Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi

4. Pasangan Urut 4 (Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM))

Tidak terkecuali bagi pasangan nomor urut 4, yaitu Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, sebab menjelang waktu pemilihan pasangan ini diterjang isu soal didukung oleh dukun. Di dalam video yang beredar di dunia maya tampak seolah beberapa orang yang disebut dukun seolah mendoakan agar Dedi Mulyadi menang dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Selain video beberapa gambar juga tersebar di dunia maya yang menyudutkan pasangan ini dengan isu yang sama.

Munculnya berbagai video maupun gambar dalam portal online yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga menimbulkan adanya kerugian bagi pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Sikap masyarakat yang pada umumnya religius cenderung menginginkan calon kepala daerah yang lebih mendekati kepada sosok yang taat dalam beragama, bukan yang dekat dengan kelompok magis atau paranormal. Bagi sebagian masyarakat Jawa Barat yang lekat dengan ajaran agama Islam maka upaya untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama dianggap penting. Munculnya informasi terkait dengan adanya aktivitas dukungan paranormal kepada pasangan calon Deddy-Dedi cenderung menimbulkan stigma negatif.

Muncul dan tersebarnya video serta informasi online yang mengkaitkan adanya dukungan dan penggunaan kekuatan paranormal (dukun) untuk pemenangan Deddy - Dedi dengan kata lain justeru memberikan dampak negatif, berita ini justeru dapat menggerus suara pasangan nomor urut 4. Adapun menurut tim kuasa hukum 2DM Hotma Agus Sihombing, bahwa terkait dengan adanya video *black campaign*, hal itu dilakukan oleh anggota grup GURKA (Gerakan Untuk Ridwan Kamil), “Pak Endang dukun itu sudah mengaku disuruh oleh salah satu paslon.”¹¹

Bahaya Black campaign Bagi Keamanan Pilkada

Munculnya kampanye hitam (*black campaign*)

¹¹“Kuasa Hukum 2DM Tuding Pengungah Video Black Campaign Pendukung Rindu.” Sumber: <http://www.rmjljabar.com/read/2018/06/21/78541/Kuasa-Hukum-2DM-Tuding-Pengungah-Video-Black-Campaign-Pendukung-Rindu-> [Diakses 31 Oktober 2018].

dalam kontestasi politik bisa saja muncul karena pasangan calon atau timnya merasa khawatir akan besarnya potensi suara yang mungkin didapatkan oleh lawan politiknya, meski sesungguhnya akan sangat sulit untuk membuktikan siapa dari lawan politiknya yang menyerang melalui aktivitas *black campaign*. Munculnya serangan berupa *black campaign* apabila tidak bisa diredam dengan komitmen politik pasangan calon maka berpotensi untuk menimbulkan adanya dorongan dari kelompok pendukung untuk melakukan serangan balik. Akan tetapi serangan balik ini bisa terjadi secara sporadis karena bisa ditargetkan kepada banyak lawan politik yang dicurigai, sedang disisi lain belum tentu semua lawan politik itu melakukan *black campaign*.

Penyebaran *black campaign* sendiri juga berpotensi dilakukan bukan oleh salah satu kandidat pasangan calon ataupun timnya melainkan oleh kelompok luar yang memiliki hubungan negatif dengan salah satu kandidat pasangan calon. Sebagai contoh, dalam Pilkada Jawa barat 2018, salah satu *black campaign* yang disuarakan adalah kedekatan Calon Wakil Gubernur nomor urut 4 Dedi Mulyadi dengan unsur-unsur klenik. Ternyata keunikan Dedi Mulyadi selama menjadi Bupati Purwakarta yang seringkali dituduh dekat dengan unsur-unsur klenik,¹² dimanfaatkan oleh tim dari pasangan calon lain untuk menyerang dirinya dengan *black campaign*.¹³

Serangan dari *black campaign* yang dilakukan oleh pihak yang tidak menyebutkan identitasnya bisa menimbulkan fitnah politik bukan hanya terhadap pihak yang diserang, tetapi juga terhadap pihak lain yang sesungguhnya tidak melakukan perbuatan *black campaign* namun pada akhirnya dianggap oleh masyarakat sebagai pihak yang melakukan *black campaign*. Sebagaimana dalam kasus yang menimpa terhadap Dedi Mulyadi, pihak yang dituduh menyebar *black campaign* adalah pasang calon nomor urut 3, yaitu Sudrajat dan Syaikh. Namun berdasarkan penelusuran tim dari nomor urut 4, Deddy dan Dedi, dan keterangan yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi bahwa yang melakukan *black campaign* bukan dari pasangan calon Sudrajat-Syaikh, melainkan adalah tim dari pasangan calon lainnya.¹⁴

Bagi pasangan Sudrajat-Syaikh menjadi tertuduh dari aktivitas *black campaign* sangat tidak menguntungkan, masyarakat akan mempersepsikan mereka sebagai pasangan calon yang menghalalkan segala cara dan itu tentunya akan semakin berdampak kepada citra pasangan calon.

¹²Puluhan dosen UIN Syarif Hidayatullah Bandung melakukan tabayun ihwal sejumlah tuduhan miring perbuatan syirik dan klenik yang selama ini ditujukan kepada Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, pada 20 April 2017. Sumber: <https://nasional.tempo.co/read/868501/dedi-mulyadi-jawab-pertanyaan-sunda-wiwitan-sampai-nyiroro-kidul> [Diakses 31 Oktober 2018]

¹³ Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa penyebar *black campaign* soal dukun palsu di Cianjur yang memberi sesajen untuk Nyi Roro Kidul bukan Paslon dan Tim dari nomor urut 3 (Sudrajat dan Syaikh). Sumber: jabar.tribunnews.com/2018/06/23/dedi-mulyadi-ungkap-soal-pembicaraannya-saat-hampiri-sudrajat-syaikh-ke-tika-jeda-debat [Diakses 31 Oktober 2018].

¹⁴Ibid

Di sisi lain bila pelaku penyebar *black campaign* yang sesungguhnya tidak diketemukan maka bisa menambah panasnya situasi politik pada masa kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang bukan tidak mungkin saling serang akan bergeser dari media sosial ke kondisi kehidupan nyata masyarakat. Hanya saja patut diapresiasi sikap dan kerja dari Tim Deddy-Dedi yang lebih memilih untuk menelusuri pelaku penyebar *black campaign* ketimbang kemudian melakukan serangan balasan serupa. Penelusuran ini membuahkan hasil dengan ditemukannya pelaku yang berasal dari tim pemenang nomor urut 1 (Rindu), dimana kemudian tim Deddy - Dedi menyerahkan penanganan kasusnya kepada lembaga penegak hukum.¹⁵

Serangan dengan *black campaign* bukan pertama kali terjadi dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat tahun 2018, sebelumnya di Pilkada Gubernur Jawa Barat tahun 2013, Ahmad Heryawan yang merupakan petahana pada saat itu dan mencalonkan kembali untuk menjadi gubernur, mendapat serangan *black campaign* berupa isu memiliki istri siri.¹⁶ Aktivitas *black campaign* meski sering mendapatkan kritik dari berbagai kalangan seperti akademisi, aparat keamanan, penyelenggara pemilu maupun pasangan calon kepala daerah namun aktivitas ini selalu terulang. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa adanya *black campaign* jika tidak disikapi dengan baik maka akan cenderung menimbulkan serangan politik serupa bagi pasangan calon kepala daerah lainnya.

Saling serang melalui *black campaign* akan sangat berpotensi menimbulkan konflik antar masa pendukung yang berdampak pada munculnya potensi gangguan keamanan, karenanya tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas *black campaign* kemudian perlu dilakukan. Berdasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Siswanto (2017: 426) dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jember, bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yang mengganggu keamanan di Pilkada Jember tahu 2015 adalah karena munculnya *black campaign* yang pada akhirnya diketahui dilakukan oleh tim dari pasangan calon Faida-Muqit Arif.

Penggunaan isu-isu sensitif sebagai bahan *black campaign* juga berpotensi menimbulkan gesekan konflik di masyarakat. Isu-isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang digunakan berpotensi menimbulkan sentimen sektoral di masyarakat. Sentimen ini menurut Direktur lembaga survei Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mencederai demokrasi dan memunculkan pengelompokan masyarakat.¹⁷ Hal itu akan menimbulkan dampak psikologis di masyarakat untuk waktu yang lama.

¹⁵“Soal Kampanye Hitam, Tim 2DM Laporkan Pendukung Rindu.” Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/soal-kampanye-hitam-tim-2dm-laporkan-pendukung-rindu-426196> [Diakses 31 Oktober 2018].

¹⁶“VIDEO: Black Campaign Serang Aher Ditemukan di Ciamis.” Sumber: <https://www.liputan6.com/news/read/520602/video-black-campaign-serang-aher-ditemukan-di-ciamis> [Diakses 31 Oktober 2018].

¹⁷“Politik SARA lebihburukdaripadapolitikuang”<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006> [Diakses 31 Oktober 2018]

Berkaca pada berbagai fenomena yang terkait dengan dampak *black campaign* maka Kepolisian Daerah Jawa Barat juga melakukan pengawasan terhadap penyebaran *black campaign* jelang rangkaian pelaksanaan Pilkada Jawa Barat tahun 2018.¹⁸

Maraknya penyebaran *black campaign* melalui jejaring internet khususnya interaksi di media sosial, membuat Polda Jawa Barat menggunakan tim siber Polda Jabar untuk mengawasi dan menindak *black campaign* di dunia maya. Menurut Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto, Satgas Siber ini melakukan pemantauan di dunia maya untuk mengantisipasi adanya isu-isu yang mengarah pada kampanye hitam atau SARA. Nantinya, jika ditemukan unsur-unsur *black campaign* akan segera ditindak oleh Polda Jabar dan diproses sesuai aturan yang berlaku. Perlunya bagi lembaga kepolisian menyikapi secara serius penyebaran *black campaign* karena dapat membuat tensi persaingan dalam Pilkada menjadi semakin bertambah panas, selain itu *black campaign* juga merupakan bentuk provokasi yang mampu menimbulkan kisruh.

Sosialisasi Anti-Black Campaign

Aktivitas *black campaign* tidak hanya menggerus kualitas dari demokrasi di tingkat lokal tetapi juga mampu memberikan ancaman terhadap keamanan sebuah wilayah. Di saat perhelatan Pilkada suasana politik seringkali berpotensi memanas, gesekan atau persinggungan yang kuat antara massa pendukung dapat menimbulkan konflik atau gangguan keamanan. Potensi konflik yang berujung pada gangguan keamanan akan semakin rumit bila pasangan calon atau tim sukses tidak mampu menyuguhkan persaingan yang sehat, atau lebih mengedepankan penyebaran *black campaign* yang berisi fitnah atau berita bohong untuk menjatuhkan lawan politik.

Kekhawatiran atas dampak negatif dari *black campaign* yang mampu menimbulkan adanya konflik atau gangguan keamanan, telah mendorong lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu maupun aparat kepolisian secara bersama-sama selalu mendorong pelaksanaan deklarasi Pilkada aman dan damai yang wajib diikuti oleh pasangan calon kepala daerah dan tim suksesnya. Dalam deklarasi kampanye aman dan damai itulah para calon kepala daerah dan tim sukses wajib menandatangani adanya pakta integritas, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen bersama yang secara langsung atau tidak langsung diharapkan mampu memberi contoh positif kepada para pendukung pasangan calon kepala daerah.

Idealnya dalam Pilkada, kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dan tim sukses lebih mengedepankan adu gagasan, program kerja maupun pengalaman. Akan tetapi, upaya untuk mengantisipasi adanya *black campaign* tetap perlu dilakukan oleh seluruh

pihak. Apabila KPU, Bawaslu dan Kepolisian telah melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya *black campaign* dengan melakukan pelaksanaan deklarasi kampanye aman dan damai, serta mengeluarkan regulasi yang dengan tegas menghukum para pelaku pembuat dan penyebar *black campaign*. Adapun lembaga pendidikan dapat membantu mencegah terjadinya gangguan keamanan akibat *black campaign* melalui aktivitas sosialisasi anti-*black campaign*.

Kegiatan sosialisasi yang mengingatkandampak negatif *black campaign* terhadap keamanan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat menjadi penting tatkala masih ditemukan adanya aktivitas-aktivitas *black campaign*, baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik digital. Kegiatan sosialisasi atas dampak negatif dari *black campaign* adalah bagian dari upaya untuk mencerdaskan masyarakat dan memperingatkan masyarakat akan potensi konflik atau gangguan keamanan yang bisa sewaktu-waktu timbul bila terpancing oleh *black campaign*.

Terkait dengan potensi penyebaran *black campaign* yang saat ini lebih melalui media elektronik digital, dimana masyarakat lebih mengenalnya dengan media sosial elektronik, maka sosialisasi dilakukan kepada kategori generasi millennial yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, ini dapat ditemui di kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat kelas 11 atau 12. Mendorong generasi muda millennial menjadi pemilih cerdas yang tidak terpancing dengan *black campaign* adalah hal penting, sebab kategeori pemilih ini lebih sering berinteraksi dengan media sosial. Adanya sosialisasi kepada kelompok ini diharapkan mampu menekan dampak negatif dari *black campaign*, mereka juga dapat menjadi agen perubahan yang turut serta menyebarluaskan kepada lingkungan terdekatnya terkait informasi atas dampak negatif *black campaign* bagi kemanan.



Gambar 5. Poster Sosialisasi Stop Black Campaign, Hate Speech dan Hoax.

¹⁸ "Tim Siber Polda Jabar Awasi Kampanye Hitam dan Politik Uang." Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3838963/tim-siber-polda-jabar-awasi-kampanye-hitam-dan-politik-uang> [Diakses 1 November 2018].

Sosialisasi dampak negatif *black campaign* terhadap keamanan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Provinsi Jawa Barat dilakukan kepada siswa kelas 11 dan 12 SMA Negeri 1 Jatinangor, Sumedang. Aktivitas sosialisasi dilakukan tidak hanya melalui penyampaian materi dan tanya jawab, tetapi juga dilakukan dengan penempelan poster stop *black campaign* di sekolah, hal ini bertujuan agar siswa termasuk juga guru dapat selalu mengingat bahaya dan dampak negatif dari *black campaign*. Atas penyelenggaraan sosialisasi ini para siswa mulai mengetahui jenis dan bahaya dan *black campaign*, para siswa dan guru juga mendorong terwujudnya Pilkada yang aman dan damai dengan menolak *black campaign*.

SIMPULAN

Black campaign adalah salah satu contoh konkrit dari sebuah kampanye politik yang diartikan secara tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum disebutkan berbagai kriteria tindakan yang termasuk dalam upaya kampanye hitam yang populer disebut sebagai *black campaign*. Salah satunya, “kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan calon atau peserta pemilu yang lain. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.”

Penggunaan *black campaign* ini dalam Pilkada Jabar 2018 terlihat cukup massif dalam menyerang seluruh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Penyebaran *black campaign* ini dilakukan melalui berbagai media cetak dan online. Hal itu dianggap mencederai semangat demokrasi dalam Pilkada Jabar 2018. Penggunaan *black campaign* dalam pilkada menimbulkan dampak negatif utamanya bagi keamanan Pilkada. *Black campaign* dapat menimbulkan konflik horizontal antar pendukung di masyarakat dan menimbulkan polarisasi kelompok pasca pelaksanaan pemilihan.

Besarnya dampak negative *black campaign* ini kemudian diantisipasi oleh seluruh pengampu kepentingan. Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU serta pengawas pemilihan yaitu Bawaslu, beserta kepolisiannya telah berusaha meminimalisir dan mencegah munculnya *black campaign* selama penyelenggaraan Pilkada. Aparat penyelenggara dan pengawas Pemilu beserta kepolisian juga tegas dalam menindak segala bentuk pelanggaran hukum terkait *black campaign*.

Kegiatan sosialisasi yang mengedukasi masyarakat terkait dampak negatif *black campaign* terhadap keamanan Pilkada di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 di nilai penting, dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) terlihat bahwa para siswa yang secara kategori usia merupakan kelompok pemilih pemula baru mengetahui istilah *black campaign* (kampanye hitam) dan dampaknya bagi gangguan keamanan. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan melalui

penyampaian materi, tanya jawab, dan penempelan poster stop *black campaign* di sekolah mendapat respon positif dari pihak sekolah karena bertujuan untuk selalu mengingatkan para siswa dan guru terkait bahaya atau dampak negatif dari *black campaign*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, Muhamad Syarif. (2017). KPU Jabar Segera Bentuk Tim Khusus, Antisipasi Kampanye Hitam. Diakses 28 Oktober 2018, dari <http://jabar.tribunnews.com/2017/09/23/kpu-jabar-segera-bentuk-tim-khusus-antisipasi-kampanye-hitam>.
- Arela F., Gresnia, Ibad Durohman, Ratu Ghea Yurisa. (2017). Saracen Terinspirasi Jasmev. Diakses 1 November 2018, dari <https://x.detik.com/detail/investigasi/20170828/Saracen-Terinspirasi-Jasmev/index.php>.
- Bebey, Aksara. (2018). Merasa diserang kampanye hitam, pasangan Asyik yakin didukung kekuatan rakyat. Diakses 31 Oktober 2018, dari Sumber: <https://www.merdeka.com/politik/merasa-diserang-kampanye-hitam-pasangan-asyik-yakin-didukung-kekuatan-rakyat.html> [Diakses 31 Oktober 2018].
- Born, Hans, et.al. (eds.). 2003. Parliamentary Oversight of the Security Sector. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) and Inter-Parliamentary Union.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Firmansyah, Kiki. (2018). Waspada Syiah PAS Jabar: Umat Islam Wajib Tolak Perayaan Hari Asyura. Diakses 31 Oktober 2018, dari <https://jurnalislam.com/waspada-syiah-pas-jabar-umat-islam-wajib-tolak-perayaan-hari-asyura/>[Diakses 31 Oktober 2018].
- Husodo, Hendro Susilo. (2018). Soal Kampanye Hitam, Tim 2DM Laporkan Pendukung Rindu. Diakses 31 Oktober 2018, dari Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2018/06/21/soal-kampanye-hitam-tim-2dm-laporkan-pendukung-rindu-426196>.
- Junari, Tri. (2018). Kuasa Hukum 2DM Tuding Pengunggah Video Black Campaign Pendukung Rindu. Diakses 31 Oktober 2018, dari <http://www.rmoljabar.com/read/2018/06/21/78541/Kuasa-Hukum-2DM-Tuding-Pengunggah-Video-Black-Campaign-Pendukung-Rindu->.
- Nugraha, Mega. (2018). Dedi Mulyadi Ungkap Soal Pembicaraannya Saat Hampiri Sudrajat - Syaikhu Ketika Jeda Debat. Diakses 31 Oktober 2018,

- dari <http://jabar.tribunnews.com/2018/06/23/dedi-mulyadi-ungkap-soal-pembicaraannya-saat-hampiri-sudrajat-syaikhu-ketika-jeda-debat>.
- Pradewo, Bintang. (2018). Jelang Pilkada Rindu Laporkan Kampanye Hitam ke Bawaslu. Diakses 31 Oktober 2018, dari <https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/26/06/2018/jelang-pilkada-rindu-laporkan-kampanye-hitam-ke-bawaslu-jabar>.
- Prihatono, T. Hari, dkk. 2007. Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif Versus Pembiaran Politik Kebijakan. Jakarta: ProPatria Institute.
- Sarasa, Agung Bakti. (2018). Pilgub Jabar, Hasanah Diserang Kampanye Hitam. Diakses 31 Oktober 2018, dari <https://daerah.sindonews.com/read/1289661/21/pilgub-jabar-hasanah-diserang-kampanye-hitam-1521027213>.
- Siregar, Liston P. (2017). Politik SARA lebih buruk daripada politik uang. Diakses 31 Oktober 2018, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42484006>.
- Siswanto, Edhi. (2017). "Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015." *Jurnal Politico*, Vol. 17 (2). <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/view/1003>.
- Sohuturon, Martahan. (2017). Saracen Terima Order Sebar SARA dengan Tarif Puluhan Juta. Diakses 1 November 2018, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170823180943-12-236779/saracen-terima-order-sebar-sara-dengan-tarif-puluhan-juta?>
- Sumantri, Arga. (2017). Kapolri Sebut Ada 8 Ancaman Keamanan Pilkada Serentak. Diakses 28 Oktober 2018, dari <http://news.metrotvnews.com/read/2017/12/30/809077/kapolri-sebut-ada-8-ancaman-keamanan-pilkada-serentak>.
- Sutisna, Nanang. (2017). Dedi Mulyadi Jawab Pertanyaan Sunda Wiwitan sampai Nyi Roro Kidul. Diakses 31 Oktober 2018 <https://nasional.tempo.co/read/868501/dedi-mulyadi-jawab-pertanyaan-sunda-wiwitan-sampai-ny-oro-kidul>.
- Syaifudin, Teuku Muhammad Guci. (2016). Warga Jawa Barat Demo Tolak LGBT. Diakses 31 Oktober 2018, dari <http://www.tribunnews.com/regional/2016/02/11/warga-jawa-barat-demo-tolak-lgbt>.
- Syarif, Helmi. (2018). Polda Bidik Puluhan Akun Sosmed Black Campaign Pilkada Bekasi dan Jabar. Diakses 28 Oktober 2018, dari <https://metro.sindonews.com/read/1285639/170/polda-bidik-puluhan-akun-sosmed-black-campaign-pilkada-bekasi-dan-jabar-1519742060>.
- Wamad, Sudirman. (2018). Tim Siber Polda Jabar Awasi Kampanye Hitam dan Politik Uang. Diakses 1 November 2018, dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3838963/tim-siber-polda-jabar-awasi-kampanye-hitam-dan-politik-uang>.
- Yulianingsih, Tanti. (2013). VIDEO: Black Campaign Serang Aher Ditemukan di Ciamis. Diakses 31 Oktober 2018, dari <https://www.liputan6.com/news/read/520602/video-black-campaign-serang-aher-ditemukan-di-ciamis>.